

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI KALIMANTAN BARAT

Dessie Yuliana¹, Rosyadi²

Universitas Tanjungpura, Indonesia

Email: dessieyuliana@gmail.com, rosyadi@ekonomi.untan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, investasi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan metode analisis regresi linier berganda, penelitian ini menemukan bahwa jumlah penduduk dan investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan IPM tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas penduduk dan investasi yang inklusif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat.

Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Jumlah Pneduduk, Investasi, IPM, Distribusi Pendapatan, Sektor Pertanian, Sektor Industri, Sektor Jasa

Abstract

This study aims to analyze the influence of population, investment, and human development index (HDI) on income inequality in Indonesia. Using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) and multiple linear regression analysis methods, this study found that population and investment have a significant influence on income inequality, while HDI does not show a significant influence. These findings indicate the need for policies that focus on improving the quality of the population and inclusive investment to reduce income inequality in West Kalimantan.

Keywords: *Income Inequality, Population Growth, Investment, Human Development Index, Income Distribution, Agricultural Sector, Industrial Sector, Service Sector*

Pendahuluan

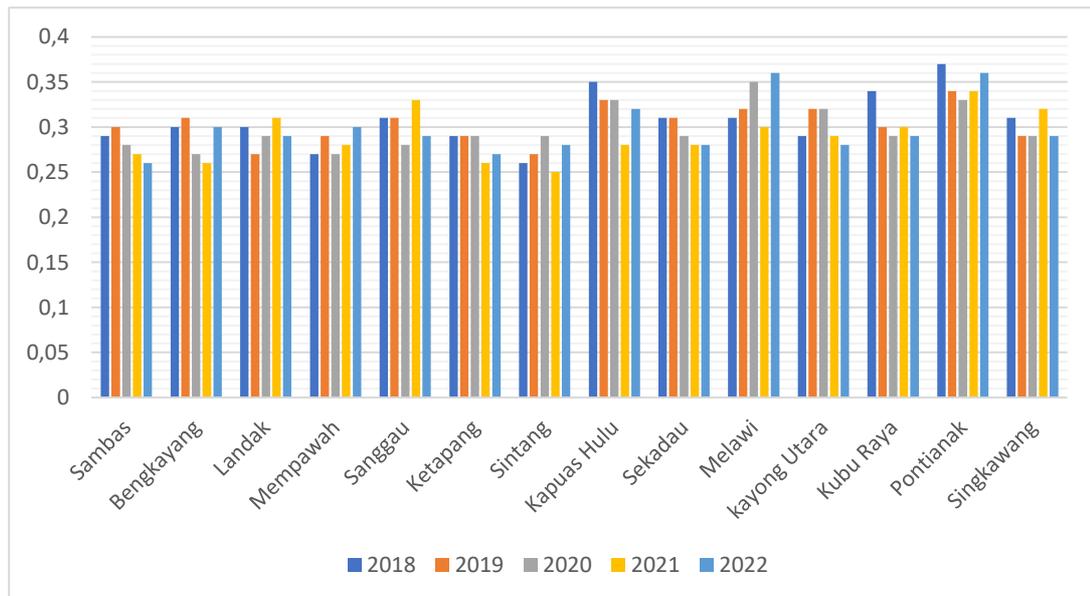
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai permasalahan yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya yaitu ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi dengan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah serta tingkat kemiskinan (Putra et al, 2022). Kondisi ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang namun juga dialami oleh negara maju. Ketimpangan pendapatan ini adalah suatu persoalan yang wajib untuk segera ditanggulangi.

Faktor utama adanya ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah karena setiap daerah memiliki karakteristik sumber daya alam dan demografi yang berbeda. Sehingga kemampuan masing-masing daerah dalam membangun daerahnya juga menjadi bervariasi. Perbedaan ini yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang

satu berbeda dengan daerah yang lain dan pembangunan ekonomi di masing-masing daerah juga berbeda-beda sehingga timbullah kesenjangan kesejahteraan di antara daerah tersebut (Sukirno,2015). Pembangunan ekonomi merupakan salah satu cara guna menanggulangi ketimpangan pendapatan. Pembangunan ekonomi itu sendiri adalah suatu tahapan jangka panjang untuk meningkatkan pendapatan perkapita penduduk suatu daerah. Pembangunan ekonomi harus berlangsung secara berkesinambungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat

Cara mengukur ketimpangan pendapatan salah satunya adalah dengan indeks gini. Dimana semakin tinggi koefisien gini maka semakin tinggi ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Demikian juga dengan semakin rendahnya koefisin gini di suatu daerah maka ketimpangan pendapatan di daerah tersebut juga dikategorikan rendah. Untuk memperlihatkan kondisi ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat maka penulis menoba menyajikan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat Tahun 2023. Dibawah ini adalah gambar yang memperlihatkan indeks gini di 14 kabupaten/ kota di Kalimantan Barat dari kurun waktu 2018 – 2022.

Gambar 1. Indeks Gini Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2022



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2023

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat berfluktuatif dengan kisaran 0,25 % sampai dengan 0,37 %. Terjadi penurunan dan kenaikan pada beberapa tahun di beberapa kabupaten / kota namun tidak terlalu besar hanya berkisar nol koma sekian tidak sampai satu persen. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan dan kenaikan disparitas pendapatan di Provinsi Kalimantan Barat secara lebih khusus yaitu di masing-masing kabupaten / kota. Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki 14 kabupaten / kota.

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi adalah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi namun tidak disertai oleh peningkatan kualitas dari penduduk itu sendiri akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Namun pembangunan ekonomi akan berjalan dengan baik jika pertumbuhan penduduk yang tinggi diikuti juga dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut. Jumlah penduduk yang banyak cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan yang ada di masyarakat. Hal ini terjadi jika meningkatnya jumlah penduduk tidak diikuti juga dengan meningkatnya kesempatan kerja. Pertumbuhan penduduk yang cepat seringkali menyebabkan peningkatan persaingan di pasar tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat menekan upah dan kesejahteraan ekonomi bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Berikut data jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

Dari Tabel 1 bisa dilihat bahwa jumlah penduduk di Kalimantan Barat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk dapat memberi dampak yang tidak baik bagi ketimpangan pendapatan, terutama jika tidak diikuti oleh kemampuan dalam menekan jumlah pengangguran (Wahyuni dan Andriyani, 2022). Jumlah penduduk yang banyak merupakan modal yang penting dalam pembangunan ekonomi, namun jika tidak disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) maka akan menjadi faktor yang menghalangi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesenjangan pendapatan (Harafah, dkk, 2022).

Tabel 1. Jumlah Penduduk di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2022

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	532.609	535.725	629.905	637.811	647.844
Bengkayang	251.320	255.261	286.366	290.943	296.855
Landak	372.609	377.305	397.610	401.103	405.396
Mempawah	261.299	264.225	301.560	305.673	310.927
Sanggau	463.995	470.224	484.836	488.527	492.989
Ketapang	504008	512.783	570.657	579.927	591.917
Sintang	413.369	418.785	421.306	423.674	426.416
Kapuas Hulu	258.984	263.207	252.609	253.740	254.995
Sekadau	199.576	201.578	211.559	212.878	214.429
Melawi	205.298	208.417	228.270	231.242	235.025
Kayong Utara	110.899	112.715	126.571	128.550	131.104
Kubu Raya	570.914	579.331	609.392	615.125	622.217
Pontianak	637.723	646.661	658.685	663.713	669.795
Singkawang	219.061	222.910	235.064	237.891	241.467
Kalimantan Barat	5.001.664	5.069.127	5.414.390	5.470.797	5.541.376

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2023

Berikut beberapa penelitian yang membahas pengaruh variabel jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan; Violin dan Lutfi (2022) dalam penelitian yang

membahas pengaruh jumlah penduduk terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada tahun 2010 – 2019 menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal serupa juga dilaporkan oleh Wahyuni dan Andriyani (2022); Sopal, Amiruddin, Rahman (2021).

Arif dan Wicaksana (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya melaporkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesenjangan pendapatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 – 2015. Hasil yang sama juga diperoleh Harafah, dkk (2022) ; Adipuryanti dan Sudibia (2015). Rahman dan Putri (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera melaporkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Investasi merupakan faktor yang dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena pemerintah atau swasta maupun penanaman modal asing (PMA) lebih cenderung untuk berinvestasi pada daerah yang dianggap berpotensi memberikan keuntungan. Sehingga ada daerah yang tidak mendapatkan investasi yang tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan ketimpangan pendapatan didaerah tersebut. Ada dua teori ketidaksetaraan yaitu Teori Harold Dumar dan Teori Neoklasik, kedua teori ini membahas tentang peran modal yang diwakili oleh investasi. Investasi yang dilakukan akan menentukan kesanggupan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, demikian juga dengan perbedaan dalam menghasilkan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang terjadi akibat adanya investasi menyebabkan perlu disusun perencanaan dan kebijakan yang mengatur tentang investasi yang dilakukan karena seringkali investasi hanya dipusatkan hanya pada satu daerah tertentu yang dianggap akan menguntungkan. Sehingga diharapkan dapat tercipta pembangunan ekonomi yang seimbang diseluruh daerah.

Data pada Tabel 2 merupakan penjumlahan dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa realisasi investasi setiap kabupaten/kota cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya investasi cenderung mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbesar kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Untuk realisasi investasi ada dua kabupaten yang menerima investasi paling sedikit yaitu Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Singkawang. Pada tahun 2018, Kabupaten Landak menerima investasi PMDN terbesar yaitu Rp. 1.189.582,68. Kemudian Kabupaten Sintang pada tahun 2019 dengan nominal Rp. 2.191.274,06. Sedangkan untuk tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Mempawah memperoleh investasi terbesar dengan nominal Rp. 4.478.738,99 dan Rp. 5.265.520,04. Pada tahun 2022 justru Kabupaten Melawi yang memperoleh investasi terbesar yaitu Rp. 2.163.198,73.

**Tabel 1. Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat Tahun
2018-2022**

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	355.520,59	400.690,57	339.549,62	241.176,35	435.164,04
Bengkayang	136.191,17	318.701,92	915.408,07	405.836,20	56.617,36
Landak	1.189.582,68	176.291,61	122.885,21	479.967,69	876.918,29
Mempawah	352.372,53	378.580,25	4.478.738,99	5.265.520,04	264.611,37
Sanggau	602.659,98	948.532,61	324.387,62	301.199,64	1.368.972,83
Ketapang	699.616,35	776.495,81	837.629,98	1.486.284,60	125.582,58
Sintang	688.574,38	2.191.274,06	449.873,00	499.801,41	572.829,34
Kapuas Hulu	469.318,00	464.386,00	930.548,81	452.806,21	1.430.963,35
Sekadau	799.009,91	556.382,07	207.792,23	244.812,59	885.806,48
Melawi	29.692,20	575.604,61	45.442,99	33.657,40	2.163.198,73
Kayong Utara	0,04	120.593,00	0,00	157.552,60	330.944,27
Kubu Raya	983.491,45	743.692,22	452.703,05	961.355,79	210.635,84
Pontianak	279.095,79	51.427,33	161.959,17	148.946,45	42.852,94
Singkawang	13.639,00	1.170,00	941,16	101.427,16	629.308,02

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2023

Beberapa penelitian terdahulu yang mengupas pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan adalah sebagai berikut (Wijayanti & Aisyah, 2020) dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia pada tahun 2000 – 2020 menunjukkan bahwa investasi dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) berpengaruh positif pada ketimpangan pendapatan. Hal senada juga dikatakan oleh Oktavia (2021), Febriyani & Anis (2022), Adipuryanti & Sudibia (2015), Ningtiyas & Dwiputri (2021). Dengan metode penelitian kuantitatif (Salsabila & Pramukty, 2023) dalam judul penelitian Pengaruh Investasi, indeks Pembangunan manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Semakin banyak jumlah investasi yang masuk maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya akan mengurangi ketimpangan pendapatan, sebaliknya jika jumlah investasi kecil maka investasi yang masuk itu kurang memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan meningkat.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh (Hartini,2017) dalam judul penelitian Pengaruh PDRB Per kapita, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011 – 2015, Hartini menyatakan bahwa investasi berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini sesuai dengan teori

Harold Domar yang menyatakan bahwa kenaikan investasi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sehingga akan mengurangi ketimpangan pendapatan suatu daerah. Hasil yang serupa juga dilaporkan oleh Pinilih (2021) dan Karim, et al. (2020).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan tolak ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pembangunan ekonomi dianggap sukses jika meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan derajat hidup masyarakat. IPM mempengaruhi produktivitas penduduk. Jika IPM rendah maka produktivitas penduduk menjadi rendah dan ini akan berdampak terhadap rendahnya pendapatan. Sebaliknya jika IPM tinggi maka produktivitas penduduk tinggi dan akan mendorong pendapatan menjadi lebih tinggi.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2022

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sambas	66,61	67,02	67,03	67,10	67,95
Bengkayang	66,85	67,57	67,87	68,04	68,74
Landak	65,45	65,96	65,98	66,21	67,17
Mempawah	64,90	65,50	65,74	66,03	66,94
Sanggau	65,15	65,67	65,77	66,20	66,91
Ketapang	66,41	67,16	67,17	67,43	67,92
Sintang	66,07	66,70	66,88	66,93	67,86
Kapuas Hulu	65,03	65,65	65,69	65,75	66,70
Sekadau	63,69	64,34	64,76	64,93	65,58
Melawi	65,05	65,54	65,55	65,87	66,81
Kayong Utara	61,82	62,66	62,68	62,90	63,81
Kubu Raya	67,23	67,76	67,95	68,16	68,91
Pontianak	78,56	79,35	79,44	79,93	80,48
Singkawang	71,08	71,72	71,94	72,11	72,89

Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2023

Tabel 3 memperlihatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat rata-rata berada dalam kategori sedang dan cenderung meningkat setiap tahunnya. IPM dianggap sebagai tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat, dengan nilai IPM yang meningkat setiap tahunnya maka diharapkan ketimpangan pendapatan di masyarakat juga akan turun. Ada dua kabupaten / kota yang masuk dalam kategori tinggi yaitu Kota Pontianak yang IPM nya pada tahun 2022 sebesar 80,48 dan Kabupaten Singkawang yang pada tahun 2022 IPM nya bernilai 72,89. Karena IPM merupakan indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam usaha membangun kualitas hidup penduduk maka penulis ingin mengetahui pengaruh antara IPM dengan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Adapun kategori IPM adalah bidang kesehatan yang mencakup umur panjang dan sehat (angka harapan hidup), bidang pendidikan yang mencakup angka melek huruf, partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah serta pendapatan perkapita. IPM memberitahukan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat diukur hanya melalui peningkatan pendapatan tapi jauh lebih besar dari itu yaitu pembangunan manusia yang dinilai dari bidang kesehatan dan pendidikan (Todaro & Smith, 2020). Indeks IPM menyatakan bahwa negara berkembang dapat berbuat lebih banyak dengan pendapatan yang rendah dan kenaikan pendapatan belum tentu berperan besar dalam pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2020).

Sejumlah penelitian yang menggunakan IPM sebagai variabel yang mempengaruhi disparitas pendapatan adalah sebagai berikut : (Ningtiyas dan Dwiputri, 2021) dalam judul penelitian Analisis Disparitas Pendapatan di Indonesia tahun 2015 – 2019 menyatakan bahwa IPM berdampak negatif terhadap disparitas pendapatan, hal serupa juga dinyatakan oleh Masruri (2016), Salsabila dan Pramukty (2023), Dwiputra (2018), Hartini (2017), Farhan dan Sugianto (2022) serta Khoiri, et.al. (2022). Namun hasil yang berbeda didapat dari penelitian Febriyani dan Anis (2022) yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia menyebutkan bahwa IPM berpengaruh positif terhadap disparitas pendapatan. Hal senada juga ditulis oleh Violin dan Lutfi (2022), Arif dan Wicaksana (2017)

Tabel 3. Kontribusi Sektor Perekonomian terhadap PDRB Tiap-tiap Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, 2020, 2022

Kabupaten / Kota	Pertanian			Industri			Jasa		
	2018	2020	2022	2018	2020	2022	2018	2020	2022
Sambas	34,45	35,81	35,19	20,97	20,30	20,33	44,57	43,89	44,48
Bengkayang	35,01	36,40	35,35	22,16	21,27	21,92	42,83	42,33	42,73
Landak	36,90	37,90	37,26	22,61	22,29	21,91	40,49	39,81	40,84
Mempawah	27,31	27,57	26,40	24,96	25,16	25,67	47,73	47,26	47,93
Sanggau	34,56	37,00	36,92	31,01	30,62	30,15	34,42	32,44	32,93
Ketapang	29,07	28,59	27,32	38,63	41,08	43,28	32,30	30,34	29,41
Sintang	25,13	26,79	26,46	29,18	28,59	28,65	45,69	44,62	44,89
Kapuas Hulu	24,57	25,75	24,77	38,62	37,83	37,50	36,81	36,43	37,73
Sekadau	38,07	39,94	40,47	20,67	19,59	19,18	41,26	40,47	40,35
Melawi	19,88	23,37	22,51	26,60	24,10	24,14	53,52	52,53	53,35
Kayong Utara	30,25	31,18	30,57	25,06	24,71	24,41	44,68	44,11	45,02
Kubu Raya	14,94	15,95	15,16	46,56	48,09	49,25	38,51	35,95	35,59
Pontianak	1,55	1,70	1,56	32,18	32,57	31,45	66,27	65,72	66,99
Singkawang	13,09	13,38	13,13	33,43	33,29	32,95	53,48	53,34	53,92

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan Tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kontribusi sektor pertanian cenderung meningkat, sedangkan untuk sektor industri dan sektor jasa cenderung menurun dari tahun ke tahun terhadap PDRB tiap=tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. sektor jasa merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi pembentukan PDRB di masing-masing kabupaten / kota di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian diikuti oleh sektor industri dan yang terakhir baru sektor pertanian. Menurut Kurniawan dan Sugianto dalam Azizah dan Suhartini (2021) pembangunan ekonomi pada daerah yang kegiatan ekonominya terpusat pada sektor industri yang tinggi akan berjalan lebih cepat dari daerah yang fokusnya terhadap sektor industri lebih rendah. Hal ini akan semakin meningkatkan ketimpangan pendapatan. Sektor pertanian juga berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sa'diyah dan Irham (2016) menyimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran yang besar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan di Papua.

Hubungan antara pembangunan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan digambarkan melalui Kurva U terbalik dalam Hipotesis Neo-Klasik. Menurut Hipotesis Neo-Klasik, di negara berkembang pada awal pembangunan ekonomi ketimpangan pendapatan akan meningkat hingga mencapai titik tertentu. Hal ini disebabkan oleh adanya proses industrialisasi dan urbanisasi dinegara tersebut. Ketimpangan akan semakin menurun saat proses pembangunan ekonomi terus berjalan, dikarenakan sektor industri berjalan dengan baik dan berhasil menarik kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian.

Simon Kuznet menyebutkan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi akan mengakibatkan peningkatan terhadap ketimpangan pendapatan. Dan yang menjadi sebabnya adalah adanya pemusatan modal pada masyarakat menengah keatas dan karena adanya perubahan dari sektor pertanian ke sektor industri, serta perbedaan sumber daya alam yang dimiliki.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dikaji lebih lanjut atas permasalahan ketimpangan pendapatan yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, investasi baik itu dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, indeks pembangunan manusia, serta kontribusi masing-masing sektor perekonomian yang terdiri atas sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa.

Ketimpangan pendapatan didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang kaya dengan yang tidak kaya. Kuznets mengatakan bahwa ketimpangan pendapatan akan terjadi pada tahap awal pertumbuhan ekonomi. Pada saat itu distribusi pendapatan akan memburuk, namun kemudian distribusi pendapatan akan meningkat dan ketidaksetaraan akan menurun, sehingga menciptakan masyarakat yang semakin adil. Singkatnya, analisis Kuznets ini menjelaskan bahwa ketidaksetaraan baru akan berkurang ketika kemakmuran tercapai. Dan berdasarkan analisis itu, ia juga menciptakan kurva “U-Reverse” atau “U-terbalik” (Melikhova & Cizek,2014)

Kurva Kuznets menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan ketimpangan pendapatan. Namun dalam jangka panjang lama kelamaan hubungan keduanya berubah menjadi korelasi

negatif. Kuznets berspekulasi bahwa kelompok berpenghasilan tinggi menyumbang sejumlah besar modal dan tabungan, sedangkan modal kelompok lain sangat kecil. Dalam kondisi lain perbedaan dalam kapasitas tabungan akan mempengaruhi konsentrasi peningkatan persentase pendapatan dalam kelompok berpenghasilan tinggi. Kondisi ini memiliki dampak kumulatif, selanjutnya akan meningkatkan kapasitas kelompok berpenghasilan tinggi dan dengan demikian meningkatkan kesenjangan pendapatan di suatu negara. Untuk mengukur tingkat keparahan dari ketimpangan pendapatan dapat diukur melalui beberapa tolak ukur. Dua diantaranya yang paling umum dan biasa digunakan dalam mengukur persoalan ketimpangan pendapatan adalah

Kurva Lorenz

Kurva Lorenz diciptakan oleh Conrad Lorenz, pada tahun 1905. Kurva ini menggambarkan hubungan antara jumlah penduduk dan distribusi pendapatan (Sastra, 2017). Terdapat dua sumbu yang menjadi komponen kurva ini, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk, yang digambarkan dalam bentuk persentase kumulatif. Sumbu vertikal berarti yang digambarkan dalam bentuk persentase kumulatif. Sumbu vertikal menunjukkan total pendapatan yang diterima untuk setiap persentase populasi, yang dijelaskan 100 % secara kumulatif.

Dengan begitu, kedua sumbu ini sama panjangnya dan akan membentuk bujur sangkar. Terdapat juga garis diagonal yang digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik yang terdapat pada garis diagonal tersebut menunjukkan persentase pendapatan yang diterima. Garis diagonal tersebut disebut sebagai garis pemerataan sempurna, garis tersebut menunjukkan distribusi pendapatan dalam keadaan pemerataan yang sempurna (*Perfect Equality*). Jika garis diagonal lebih jauh, semakin besar tingkat ketimpangan. Situasi paling ekstrim ditunjukkan ketika Kurva Lorenz bertepatan dengan sumbu horizontal terendah dan sumbu vertikal kanan. Ini disebabkan oleh fenomena ketimpangan sempurna, misalnya itu adalah kondisi dimana semua pendapatan diterima oleh satu orang.

Indeks Gini

Koefisien gini merupakan hasil kuantifikasi dari konsep Kurva Lorenz. Indeks ini diciptakan oleh Corrado Gini pada tahun 1912 yang terdapat dalam karyanya yang berjudul *Variabilita e mutabilita*. Indeks Gini merupakan indikator ketimpangan pendapatan yang sering digunakan untuk melihat seberapa besar penyimpangan yang terjadi dalam distribusi pendapatan masyarakat. Indeks Gini yang nilainya mendekati angka 0, adalah koefisien yang tergolong rendah dan menunjukkan adanya kesetaraan pendapatan, sedangkan Indeks Gini yang nilainya mendekati 1 merupakan koefisien yang tergolong tinggi dan menunjukkan ketidak merataan distribusi. Ada 5 macam tingkat ketimpangan pendapatan (Sastra, 2017), yaitu : Ketimpangan sangat tinggi (Rasio Gini $\geq 0,8$), Ketimpangan tinggi (0,6-0,79), ketimpangan sedang (0,4 - 0,59), ketimpangan rendah (0,2-0,39) dan terakhir ketimpangan sangat rendah ($<0,2$).

Ketimpangan pendapatan merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Violin & Lutfi (2022) mengkaji ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada tahun 2010-2019 dan menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh. Wahyuni & Andriyani (2002) di Aceh menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. Sementara itu, penelitian di Sulawesi Tenggara oleh Harafah et al. (2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Faktor investasi juga dianggap signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Pinilih (2021) dalam penelitiannya di Jawa Tengah menemukan bahwa investasi domestik berpengaruh signifikan terhadap disparitas pendapatan, tetapi investasi asing tidak. Penelitian di Yogyakarta oleh Octavia (2021) dan di Indonesia oleh Wijayanti & Aisyah (2022) juga menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

IPM adalah indikator penting yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia, dan beberapa penelitian menunjukkan bahwa IPM berhubungan dengan ketimpangan pendapatan. Dwiputra (2018) menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Namun, Violin & Lutfi (2022) menyatakan bahwa IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sebaliknya, Arif & Wicaksono (2017) di Jawa Timur menemukan bahwa IPM berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Sektor ekonomi juga memainkan peran penting dalam ketimpangan pendapatan. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Ikhsan, Ariusni & Putri (2019), menyatakan bahwa sektor pertanian berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan sektor industri tidak signifikan. Winarni & Hartono (2023) menyebutkan bahwa pertumbuhan di beberapa sektor ekonomi dapat mengurangi ketimpangan, terutama sektor pertanian. Namun, Kurniawan & Sugianto (2013) menyimpulkan bahwa sektor pertanian dan industri di Jawa Tengah berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda untuk meneliti pengaruh jumlah penduduk, investasi, indeks pembangunan manusia, dan kontribusi sektoral terhadap disparitas pembangunan di Kalimantan Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat dan BPS kabupaten/kota, mencakup periode 2018 hingga 2022. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah disparitas pendapatan yang diukur menggunakan Indeks Gini. Variabel bebas yang digunakan meliputi jumlah penduduk, investasi, indeks pembangunan manusia, serta kontribusi sektor pertanian, industri, dan jasa. Untuk analisis, digunakan uji hipotesis melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F), serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk menilai sejauh mana

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

variabel independen menjelaskan variabel dependen. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pembangunan dan ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Adapun model regresi yang penulis gunakan adalah

$$IG = \beta_0 + \beta_1JP + \beta_2I + \beta_3IPM + \beta_4SP + \beta_5SI + \beta_6SJ + e \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

- IG = Disparitas Pendapatan
- β_0 = Konstanta
- JP = Jumlah Penduduk
- I = Investasi
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- SP = Kontribusi Sektor Pertanian
- SI = Kontribusi Sektor Industri
- SJ = Kontribusi Sektor Jasa
- e = error

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2). Nilai R-square adalah sebesar 0,651658 yang berarti bahwa variabel bebas yaitu investasi, jumlah penduduk, IPM, kontribusi pertanian, industri dan jasa dapat menjelaskan variabel terikat yaitu ketimpangan pendapatan sebesar 65,16 persen dan 34,84 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya diluar variabel yang diteliti.

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa nilai probabilitas uji simultan (uji F) diperoleh sebesar 0,000003 lebih kecil dari taraf signifikan alpha 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi, jumlah penduduk, IPM, kontribusi pertanian, industri, dan jasa secara simultan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel 4.5, terdapat berbagai pengaruh dari beberapa faktor terhadap ketimpangan pendapatan. Pertama, investasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,7252 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Selanjutnya, jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai probabilitas 0,0406 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai probabilitas 0,6249 yang juga lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, menandakan bahwa peningkatan IPM tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan. Sementara itu, kontribusi sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas 0,0459 yang lebih kecil dari taraf signifikansi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi sektor pertanian dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Demikian pula, kontribusi sektor industri berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan nilai probabilitas 0,0333. Terakhir, kontribusi sektor jasa juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, dengan nilai probabilitas

0,0423 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Kesimpulannya, sementara beberapa faktor seperti jumlah penduduk berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, kontribusi dari sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, industri, dan jasa justru membantu mengurangi ketimpangan tersebut.

Berikut hasil dari Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 5. Hasil Uji Model Regresi

	Prob.	Keputusan
Uji Chow	0,0002	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Hausman	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Uji Lagrange Multiplier	0,0000	<i>Random Effect Model</i>

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2024

Berdasarkan hasil pada Tabel 5, uji statistik menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih disarankan untuk digunakan dalam penelitian ini. Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas 0,0000, yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05, menunjukkan bahwa Fixed Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model. Hasil serupa diperoleh dari Uji Hausman, di mana nilai probabilitas juga sebesar 0,0000, menandakan bahwa Fixed Effect Model lebih baik dibandingkan dengan Random Effect Model. Sementara itu, Uji Lagrange Multiplier dengan nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa Random Effect Model lebih baik daripada Common Effect Model. Namun, secara keseluruhan, hasil pengujian merekomendasikan penggunaan Fixed Effect Model dalam analisis regresi linier berganda ini. Analisis dilakukan menggunakan software EViews, yang mendukung hasil tersebut.

Tabel 6. Hasil Uji Model(Fixed Effect Model)

Variable	Coefficient	Std, error	T-statistic	Prob	Prob. Uji f	R ²
C	52,4848	30,220	1,7367	0,0886	0,000003	0,651658
Loginvestasi	-0,0007	0,0021	-0,3535	0,7252		
Logjumlahpenduduk	0,0409	0,2664	1,6160	0,0406		
Ipm	-0,0026	0,0052	-0,4919	0,6249		
Jasa	-0,5124	0,3019	-1,6968	0,0459		
Pertanian	-0,5157	0,3014	-1,7108	0,0333		
Industri	-0,5180	0,3018	-1,7162	0,0423		

Sumber: Hasil Olah Data Eviews 10, 2024

Dari persamaan regresi linier berganda dapat dijelaskan sebagai berikut

$$IG = 52,48481 - 0,000777LogI + 0,040947 \text{ Log JP} - 0,002601IPM - 0,515739SP - 0,518095SI - 0,512433SJ + e$$

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan, didapatkan bahwa masing-masing variabel memiliki pengaruh berbeda terhadap ketimpangan pendapatan. Pertama, nilai koefisien untuk investasi adalah -0,000777, menunjukkan bahwa peningkatan investasi sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,000777 persen, dengan asumsi variabel lainnya seperti jumlah penduduk, IPM, dan kontribusi dari sektor pertanian, industri, serta jasa tetap. Selanjutnya, jumlah penduduk memiliki koefisien sebesar 0,04094, yang berarti peningkatan jumlah penduduk sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,04094 persen. Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan koefisien

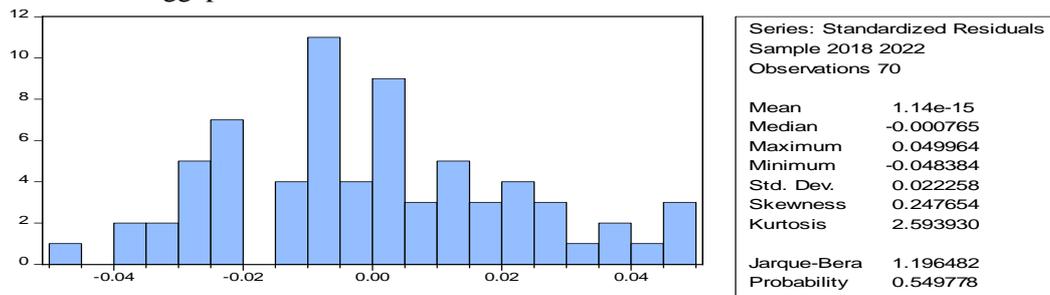
Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

sebesar -0,002601, yang menunjukkan bahwa peningkatan IPM sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,002601 persen. Selain itu, kontribusi sektor pertanian memiliki koefisien -0,515739, yang berarti peningkatan kontribusi pertanian sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,515739 persen. Demikian pula, kontribusi sektor industri memiliki koefisien -0,518095, menunjukkan bahwa peningkatan kontribusi industri sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,518095 persen. Terakhir, kontribusi sektor jasa memiliki koefisien -0,512433, yang berarti peningkatan kontribusi sektor jasa sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar 0,512433 persen. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa peningkatan kontribusi dari sektor pertanian, industri, dan jasa memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, sementara peningkatan jumlah penduduk justru cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah residual memiliki distribusi normal. Jika statistik JB lebih kecil dari nilai Chi-Square atau p-value > 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Sebaliknya, jika statistik JB lebih besar dari nilai Chi-Square atau p-value < 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal.



Gambar 2 hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas, diperoleh bahwa nilai probabilitas sebesar 0,549778 yang berarti bahwa data yang digunakan berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	Gini_ratio	Log Investasi	Log Jumlah Penduduk	Ipm	Jasa	Pertanian	Industri
Gini_ratio	1	-0,1536	-0,0605	0,36536	0,4221	-0,4759	0,1456
Loginvestasi	-0,1536	1	0,2046	-0,3336	-0,4368	0,3421	0,0417
Logjumlah penduduk	-0,0605	0,2046	1	0,4994	-0,0830	-0,2392	0,3981
Ipm	0,3653	-0,3336	0,4994	1	0,6679	-0,7723	0,2552
Jasa	0,4221	-0,4368	-0,0830	0,6679	1	-0,6571	-0,2577
Pertanian	-0,4759	0,3421	-0,2392	-0,7723	-0,6571	1	-0,5589
Industri	0,1456	0,0417	0,3981	0,2552	-0,2577	-0,5589	1

Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, diperoleh bahwa seluruh variabel memiliki nilai koefisien lebih kecil dari 0,85 sehingga diperoleh bahwa seluruh data tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test
 Null hypothesis: Residuals are homoskedastic
 Equation: UNTITLED
 Specification: GINI_RATIO C LOGINVESTASI IPM LOGJUMLAH_PENDUDUK
 PERTANIAN JASA INDUSTRI

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	11,70920	14	0.6296

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	167,1817	63
Unrestricted LogL	173,0363	63

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Tabel di atas bahwa hasil output heteroskedastisitas menunjukkan nilai probabilitas adalah 0,6296. Oleh karena nilai p value $0,6296 > 0,05$ maka H1 ditolak atau yang berarti model lolos heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi

Mean dependent var	0,135697
S.D. dependent var	0,019258
Akaike info criterion	0,021533
Schwarz criterion	1,865623
Hannan-Quinn criter.	0,299200
Durbin-Watson stat	1,133541

Sumber: Hasil Olah Data Eviews, 2024

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi nilai Durbin Watson pada model Summary adalah sebesar 1,133541. jadi karena 1,133541 berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi.

Pengaruh Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan tidak signifikan dan cenderung negatif. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang mempengaruhi struktur ekonomi dan distribusi pendapatan di Kalimantan Barat. Salah satu faktor utama adalah konsentrasi investasi pada sektor-sektor yang sudah kaya akan modal dan teknologi, seperti pertambangan atau industri besar-besaran.

Tabel 10. Realisasi Proyek dan Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing di Kalimantan Barat Tahun 2023

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Sektor		PMDN		PMA	
		Proyek	Nilai	Proyek	Nilai
Primer	Tanaman pangan, Perkebunan dan peternakan	848	3.945.741	407	309.335
	Kehutanan	150	102.185	26	6.335
	Perikanan	80	7.784	-	-
	Pertambangan	835	2.541.236	28	4.302
Sekun der	Industri kendaraan bermotor Dan alat transportasilain	18	5.571	8	32
	Industrimesin,elektronik, Instrumenkedokteran,peralatanlistrik, presisi,optikdanjam	12	-	1	-
	Industrikaretandanplastik	25	7.492	23	163
	Industrikayu	52	53.759	7	3
	Industrikertas,barangdari Kertasdanpercetakan	9	5	-	-
	Industrikimiadanfarmasi	55	87.015	28	46.906
	Industrikulit,barangdari Kulitdansepatu	-	-	-	-
	Industri mineral non-logam	61	534	10	372
	Industri logam dasar, barang logam buka nmesindanperalatannya	42	4.622.445	33	32.854
	Industri makanan	395	1.483.697	292	68.597
	Industri tekstil	9	-	-	-
Industri lainnya	59	1.286	21	-	
Tersie r	Hotel dan restoran	299	95.007	73	1.186
	Konstruksi	1.355	255.356	2	1
	Listrik, gas dan air	103	165.034	16	91
	Perdagangan dan reparasi	2.284	579.815	149	1.666
	Perumahan, kawasan Indsutridan perkantoran	127	193.516	14	5.643
	Transportasi, gudang, Dan telekomunikasi	479	405.264	47	12.524
	Jasalainnya	468	339.213	94	459
	Jumlah	7.765	14.891.955	1.279	490.469

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2024

Keuntungan yang dihasilkan dari investasi semacam itu cenderung lebih terkonsentrasi pada segmen tertentu dari masyarakat, meningkatkan ketimpangan pendapatan. Selain itu, ketidakmerataan akses terhadap investasi dan peluang ekonomi juga dapat memperkuat ketimpangan pendapatan, terutama jika investasi lebih banyak terjadi di wilayah yang sudah maju secara ekonomi atau di sektor-sektor yang memerlukan keterampilan khusus.

Data yang disajikan menunjukkan realisasi proyek dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kalimantan Barat pada tahun 2023. Dari Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa sebagian besar investasi terkonsentrasi pada sektor-sektor

tertentu, seperti pertambangan, industri logam dasar, industri makanan, dan perdagangan. Sektor-sektor ini seringkali termasuk dalam kategori yang memiliki potensi untuk meningkatkan ketimpangan pendapatan, terutama jika keuntungan dari investasi tersebut tidak didistribusikan secara merata di masyarakat.

PMDN dominan dalam jumlah proyek dan nilai investasinya dibandingkan dengan PMA, yang menunjukkan bahwa investor lokal memiliki peran yang lebih besar dalam perekonomian Kalimantan Barat. Namun, ketimpangan tetap bisa terjadi tergantung pada sektor dan distribusi investasi di antara sektor-sektor tersebut. Misalnya, sektor pertambangan memiliki jumlah proyek dan nilai investasi yang signifikan, yang bisa meningkatkan ketimpangan jika keuntungan yang dihasilkan tidak merata di masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pinilih (2021), Octavia (2021), dan Wijayanti & Aisyah (2022), namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017), Karim, Priyagus, & Awaluddin (2020). Pinilih (2021) dan Octavia (2021) menemukan bahwa investasi cenderung tidak merata dan lebih menguntungkan sektor-sektor tertentu, yang kemudian meningkatkan ketimpangan pendapatan. Wijayanti & Aisyah (2022) juga menunjukkan bahwa konsentrasi investasi pada sektor-sektor yang sudah maju memperbesar kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2017) dan Karim, Priyagus, & Awaluddin (2020) menemukan bahwa investasi dapat memiliki dampak positif terhadap pemerataan pendapatan, tergantung pada distribusi investasi yang lebih merata dan inklusif. Mereka berargumen bahwa investasi yang diarahkan pada sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan mendukung usaha kecil dan menengah dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat, perlu adanya strategi yang memastikan distribusi investasi yang lebih merata dan inklusif. Pemerintah dapat memainkan peran penting dengan mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, seperti pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) serta peningkatan akses terhadap pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal juga penting untuk memastikan bahwa manfaat dari investasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong investasi di wilayah-wilayah yang kurang berkembang untuk memastikan distribusi ekonomi yang lebih merata. Pengawasan dan evaluasi terhadap dampak investasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar efektif dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk serta sektor pertanian, industri, dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Kalimantan Barat. Pertumbuhan jumlah penduduk meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja, yang menekan upah dan memperlebar kesenjangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Sektor industri berperan penting karena menciptakan lapangan kerja yang stabil dan berpenghasilan lebih tinggi, mendistribusikan pendapatan lebih merata. Sektor pertanian, yang menjadi sumber utama mata pencaharian di daerah pedesaan, memperburuk ketimpangan karena praktik

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

yang kurang modern dan produktif. Sektor jasa, dengan variasi pekerjaan dan pendapatannya, dapat memperbesar ketimpangan jika peningkatan pendapatan lebih dirasakan oleh pekerja berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Investasi sering terfokus pada proyek atau daerah tertentu, sehingga dampaknya tidak merata dan tidak segera terlihat dalam peningkatan pendapatan. Sementara itu, meskipun IPM menunjukkan peningkatan dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, perbaikan ini tidak selalu langsung mengurangi ketimpangan pendapatan, terutama karena perbedaan kualitas layanan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Untuk mengurangi ketimpangan dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, penting untuk mendiversifikasi investasi, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, menguatkan sektor pertanian, membangun infrastruktur, memberdayakan UMKM, serta mempromosikan pariwisata dan industri kreatif. Implementasi saran-saran ini secara holistik dan berkelanjutan dapat membantu Kalimantan Barat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi ketimpangan pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adipuryanti, N. L. P. Y. & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Piramida Vol. XI No. 1, Juli 2015*.
- Anggina, D., & Artaningtyas, W. D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *15(1), 13–40*.
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(6), 85-96*.
- Arif, W. & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Propinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. The 6th University Research Colloquium 2017. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Azizah, R. N. & Suhartini, A. M. (2021). Pengaruh Sektor Industri, Sektor Pertanian, dan Sumber Daya Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan di Jawa Barat Tahun 2015-2019. *Seminar Nasional Official Statistics 2021*.
- Damanik, A. M., Zulgani & Rosmeli. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan daerah Vol. 7. No.1, Januari – April 2018*

- Darzal. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan daerah Vol. 4 No. 2, Oktober-Desember 2016*
- Diwan, R., Liu, Z., & Spiegel, M.M. (2021). Capital Flow Surges and Rising Income Inequality.
- Dwiputra, R. M. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia (periode 2011-2016) (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Universitas Brawijaya Malang, Indonesia.
- Ekananda, M. (2016). *Analisis Ekonometrika Data Panel Bagi Penelitian Ekonomi Bisnis Dan Sosial*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Fadillah, Andiny, P., & Syahputra, R. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Distribusi Pendapatan di Aceh Bagian Timur. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*.
- Fanshuri, R., Mahardika, P., Saputra, A., Pembangunan, E., Ekonomi, F., & Brawijaya, U. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kemiskinan Ipm Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *1(1), 148–160*.
- Farhan, M. & Sugianto (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa. *Sibatik Journal/Volume 1 No. 3 (Februari 2022)*
- Febriyani, A. & Anis, A. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 3, Nomor 4, Desember 2021, Hal 9-16*
- Harafah, L.M., Balaka, M. Y., Aedy, H., Saranani, F. & Rumbia, W. A. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 7, Nomor 2. Tahun 2022*
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB Per Kapita, Investasi dan IPM terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Propinsi DIY Tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi, Volume 6, Nomor 6, Tahun 2017*.
- Ikhsan, A. K., Ariusni, & Putri, D. Z (2019). Analisis Pengaruh Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Dan Sektro Industri terhadap Ketimpangan Distribusi Pendpaatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019*
- Istiqamah. Syaparuddin. dan Selamat, Rahmadi. (2018) “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (studi provinsi-provinsi di Indonesia)”. dalam *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol. 7. No. 3. ISSN 2303-1255 : Universitas Jambi*
- Jahril, S.P. (2024). Peran Indeks Gender, Pemberdayaan, Populasi, dan Kemiskinan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Barru. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*.

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

- Karim, A., Priyagus & Awaluddin, M. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Disparitas Pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*; 5(3), 2020
- Khoiri, A. Z., Pahlawan, E. R. & Samara, F. H. Ketimpangan Pendapatan di Indonesia : Pendekatan Data Panel 2016-2020. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Kurniawan, B. R. A. & Sugianto, FX (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Share Sektor Industri dan Pertanian serta Tingkat Jumlah Orang yang Bekerja terhadap Ketimpangan Wilayah anatar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2002-2010. *Diponegoro Journal of Economics, Vol. 2, No. 1, Tahun 2013, Hal. 1-14.*
- Masruri (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, TPAK dan Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2014 (*Jurnal Ilmiah*), Universitas Brawijaya Malang, Indonesia.
- Melikhova, O. & Cizek, J. (2014). Kuznets inverted U-Curve hypothesis examined on up-to date observations for 145 countries. *Praque Economic Papers*,3,2014
- Muharam, Kautsar Ibnu. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 – 2020. *Journal Of Development Economic and Social Studies, 2022, Volume 1(2): 284- 294*
- Ningtiyas, N. & Dwiputri, I. N. (2019). Analisis Disparitas Pendapatan di Indonesia tahun 2015-2019: Analisis Regresi Data Panel. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan, 1(7), 2021,670-685*
- Octavia, H. S. (2021). Analisis Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Investasi terhadap Ketimpangan Pendapatan (Studi kasus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2019).
- Pinilih, M. (2021). Disparitas Pendapatan di Jawa Tengah. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2021, Volume 8 (1): 42-48.*
- Priatin, R. (2022). Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, IPM, PAD, Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Industri dan Pertambangan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Pulau Sumatera tahun 2016-2020 (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia.
- Putra, H.M., Ahyani, H., Abdurohman, D., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2022). Relevansi Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengalokasian dan Pendistribusian Pendapatan Negara di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.*
- Rahman, R. & Putri, D. Z. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan Provinsi di Pulau Sumatera. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 3, No. 3, September 2021, hal 37-48.*
- Rais, Dalimunthe, A.A., Fitrianto, A., Sartono, B., & Oktarina, S.D. (2022). Regency Clusterization Based on Village Characteristics to Increase the Human Development Index (IPM) in Papua Province. *Jurnal Ekonomi Pembangunan.*

- Sukirno, Sadono. 2015. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Raja rafindo Persada
- Salsabila, N. A. & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Vol.2, No.2, Januari-Juni 2023*.
- Sa'diyah, S. H. & Irham (2016). Peran Sektor Pertanian dalam mengurangi Ketimpangan Pendapatan di Wilayah Papua Sebelum dan Sesudah Otonomi Khusus. *Agro Ekonomi. Vol. 27/No. 1, Juni 2016*
- Sastra, Eka. 2017. Kesenjangan Ekonomi. Jakarta: Expose
- Sidqiy, A., & Amar, S. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan, 9(1)*, 48-57
- Sopal, R., Amiruddin & Rahman, A. (2021). Studi ketimpangan Distribusi Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. *ICOR : Journal of Regional Economics. Vol. 02, No. 02 Agustus (2021)*.
- Sulistyaningrum, B. I., Bhinadi, A., & Astuti, R. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Ketimpangan. *Sinomika Journal, 1(4)*, 891–902.
- Sutiono, F. & Syafitri, W. (2018). Belanja Kementrian/Lembaga, Belanja APBD, Kontribusi Sektoral, dan Ketimpangan Pendapatan di jawa Timur. Indonesian Treasury Review: *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan negara dan Kebijakan Publik, Tanggal 6 Desember 2018*.
- Thomas, C. (2015). Income Inequality and Economic Development in Latin America: A Test for the Kuznets Inverted-U Curve.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development. Pearson UK..
- Violin, Z. I. & Lutfi, M. Y. (2022). Analisis Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa dan Faktor yang Mempengaruhinya Tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2 No. 1 April 2022 hal : 227-252*
- Wahyuni, S. & Andriyani, D. (2022). Pengaruh Inflasi, Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal, Volume 05, No. 1, 2022*
- Widarjono, A. (2015). Analisis multivariat terapan : dengan program apss, amos, dan smartpls. UPP STIM YKPN
- Wijayanti, E. S. & Aisyah, S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Asing, Inflasi, dan Trade Openness terhadap Ketimpangan di Indonesia Tahun 2000-2020. *Ekonomis : Journal of Economics and Business, 6(2), September 2022, 534-540*.
- Winarni, D. T. & Hartono, D. (2023). Dampak Pertumbuhan Sektoral terhadap Ketimpangan Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia : Analisis menggunakan Sosial Accounting Matrix dan Micro-Simulation. *Jurnal Kebijakan Ekonomi, Volume 18. Vol. 18: Iss. 1, Article 1*

Pengaruh Jumlah Penduduk, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Kalimantan Barat

Zaini, Ahmad (2017). Pengaruh Kekayaan Sumber Daya Alam Batubara terhadap
Ketimpangan Pendapatan di Propinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Borneo
Administrator/Volume 13/No.2/2017*